

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, 2005, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi Di Indonesia*, Bayumedia Publishing.
- Andi Hamzah, 2011, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- _____, 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Bagir Manan, 2004, *Hukum Positif Indonesia (suatu Kajian Teoritik)*, Uii press, Yogyakarta.
- Bryan A. Garner, 1999, *Black's Law Dictionary*, ST. Paul, Minn : West Group.
- Djoko Prakoso, 1984, *Peradilan In Absensia di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Indryanto Seno Adji, 2001, *Arah Sistem Peradilan Pidana*, Kantor Pengacara Dan Konsultan Hukum Prof. oemar Seno Adji, SH & Rekan, Jakarta, Edisi Khusus Untuk program Magister Hukum UNPAD.
- _____, 2003, *Problematika Korupsi Dan Antisipasinya Melalui Sistem Hukum Pidana*, Media Hukum Vol 2 No. 8.
- Komariah Emong Supardjaja, 2002, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Hukum Pidana Indonesia, Studi Kasus Tentang Penerapan Dan Perkembangannya Dalam Yurisprudensi*, Alumni, Bandung.
- Loebby Loqman, 2002, *Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Hukum Acara Pidana*, Datacom, Jakarta.
- Mahrus Ali, 2010, *Korupsi Di Indonesia*, Uii Press, Yogyakarta.
- Mardjono Reksodiputro, 1993, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, (Melihat pada Kejahatan dan penegakan Hukum, Dalam Batas-batas Toleransi)*, Pidato pengukuhan Guru Besar pada fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1994, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana: Kumpulan Karangan Baku Ketiga*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta.

- _____, 1994, *Kriminologi dan Sistem peradilan Pidana*, Pusat pelayanan keadilan dan pengabdian Hukum, Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Mien Rukmini, 2006, *Aspek Hukum Pidana Dan Kriminologi*, Alumni, Bandung.
- Muladi, 2002, *Hak Asasi manusia, Politik Dan Sistem peradilan Pidana*, Badan Penerbitan, Universitas Diponegoro, Semarang.
- _____, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbitan, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Romli Artasasmita, 2004, *Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional Dan Aspek Internasional*, CV.Mandar Maju, Bandung.
- _____, 1983, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung.
- _____, 1983, *Hukum Acara Pidana*, Bina Cipta, Bandung.
- _____, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Edisi Pertama, Cetakan Ke- 1, Kencana, Jakarta.
- Sidik Sunaryo, 2004, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UMM Press, Malang.
- Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, penyidikan dan penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Yesmil Anwar & Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya di Indonesia)*, Widya Padjajaran. Bandung.

Sumber - sumber Lain

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang No 7 Drt Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi

Undang-undang No. 24 Tahun 1960 Tentang Pengusutan, Pununtutan, Dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang No. 3 tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi

Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang No. 7 Tahun 2006 Tentang pengesahan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), 2003

Undang-undang No.46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Konvensi Palermo 2000 terhadap Kejahatan Terorganisir Transnasional (*United Nations Convention On Against Transnational organized Crime*)

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 2003